

## MATRIKS PERBANDINGAN

**Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah**

|  |  |
|--|--|
| <p>PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH<br/>NOMOR 7 TAHUN 2021 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU<br/>PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,<br/>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR<br/>BIASA<br/>DI PROVINSI JAWA TENGAH</p>  | <p>PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH<br/>NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS<br/>PERATURAN GUBERNUR NOMOR JAWA TENGAH NOMOR 7<br/>TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN<br/>GUBERNUR NOMOR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2021<br/>TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA<br/>SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH<br/>KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA<br/>TENGAH</p> |
| <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br/>GUBERNUR JAWA TENGAH</p>  | <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br/>GUBERNUR JAWA TENGAH</p>  |
| <p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu adanya pengaturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar pelaksanaan Penerimaan</p> | <p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;</p>               |

|   |   |
|---|---|
| <p>Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah;</p>  | <p>b. bahwa ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan kepada Aparatur Sipil Negara di Jawa Tengah termasuk kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;</p>   |
| <p style="text-align: center;">Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Lembaran Negara</li> </ol> | <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</li> </ol> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);</p> <p>8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);</p> | <p>2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7);</p> |
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH.</p>  | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>BAB I</b><br/><b>KETENTUAN UMUM</b></p>  |  |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 7), diubah menjadi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka baru, yaitu angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</li> </ol>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>8. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus</li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| <p>yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.</p> <p>9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.</p> <p>10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).</p> <p>11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.</p> <p>12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang</p> | <p>8. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.</p> <p>9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.</p> <p>10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).</p> <p>11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.</p> <p>12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>14. Sekolah Menengah Kejuruan Boarding School yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.</p> <p>15. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.</p> <p>16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p> <p>17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.</p> <p>19. Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> <p>20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.</p> | <p>13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.</p> <p>14. Sekolah Menengah Kejuruan Boarding School yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.</p> <p>15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.</p> <p>16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.</p> <p>17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.</p> <p>19. Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>21. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.</p> <p>22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>23. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.</p> <p>24. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.</p> <p>25. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.</p> <p>28. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan</p> | <p>20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.</p> <p>21. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.</p> <p>22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p> <p>23. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.</p> <p>24. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.</p> <p>25. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.</p> <p>26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.</p> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p> | <p>28. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.</p> <p>29. Orang tua adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai peran dan tanggung jawab pada anak dalam membekali dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan, didikan, arahan yang dapat membantu menjalani kehidupan.</p> <p>30. Wali Calon Peserta Didik adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan Calon Peserta Didik yang bersangkutan yang dibuktikan pencantuman dalam Kartu Keluarga Wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.</p> <p>31. Yatim dan/atau piatu adalah Calon Peserta Didik yang sudah tidak memiliki ayah dan/atau ibu akibat ayah dan/atau ibu Calon Peserta Didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.</p> <p>32. Tenaga kesehatan dan tenaga pendukung adalah orang yang menangani langsung pasien Covid-19 dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 melalui kontak langsung dengan pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19.</p> |
| <p><b>BAB II</b><br/><b>MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah.   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin PPDB terselenggara secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan PPDB pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Pengecualian;</li> <li>c. Pelaporan;</li> <li>d. Pengendalian;</li> <li>e. Pengaduan;</li> <li>f. Informasi;</li> <li>g. Larangan;</li> <li>h. Sanksi; dan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Penutup.</li> </ol> |  |
| <p><b>BAB III</b></p> <p><b>PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</b></p>   |  |
| <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.</li> <li>(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPDB SMA, SMK dan SLB.</li> </ol>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>(3) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK LB);</li> <li>b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);</li> <li>c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB); dan</li> <li>d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).</li> </ol>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.</p> <p>(2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.</p> <p>(2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. publikasi penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah secara terbuka;</li> <li>b. pendaftaran;</li> <li>c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</li> <li>d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan</li> <li>e. daftar ulang.</li> </ol> |  |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kedua<br/>Publikasi</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.  |  |
| Bagian Ketiga<br>Pendaftaran   |  |
| Pasal 9<br>Pendaftaran PPDB dilaksanakan secara daring oleh masing-masing calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.  |  |
| Bagian Keempat<br>Jalur PPDB   |  |
| Paragraf 1<br>Umum   |  |
| Pasal 10<br>PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:<br>a. Jalur zonasi;<br>b. Jalur afirmasi;<br>c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau<br>d. Jalur prestasi.  |  |
|  |  |
| Paragraf 2<br>Jalur Zonasi   |  |
|  | 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :   |
| Pasal 11<br>(1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang jarak/radius domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga dalam zona sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. | Pasal 11<br>(1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang jarak/radius domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga dalam zona sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah. |

|  |   |
|--|---|
| <p>(2) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pondok Pesantren yang bersangkutan.</p> <p>(3) Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Panti Asuhan berdasarkan data base yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(4) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam dan/atau sosial, zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.</p> <p>(5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.</p> <p>(7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.</p> <p>(8) Penetapan zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.</p> <p>(9) Penetapan zonasi oleh Kepala Dinas atas usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dapat melibatkan stakeholder pendidikan.</p> | <p>(2) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pondok Pesantren yang bersangkutan.</p> <p>(3) dihapus.</p> <p>(4) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam dan/atau sosial, zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.</p> <p>(5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(6) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.</p> <p>(7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.</p> <p>(8) Penetapan zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.</p> <p>(9) Penetapan zonasi oleh Kepala Dinas atas usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dapat melibatkan stakeholder pendidikan.</p> <p>(10) Wilayah kecamatan yang belum berdiri satuan pendidikan SMA atau SMK Negeri dapat diberikan kuota khusus pada jalur zonasi</p> |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>(10) Wilayah kecamatan yang belum berdiri satuan pendidikan SMA atau SMK Negeri dapat diberikan kuota khusus pada jalur zonasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang menjadi wilayah zonasinya.</p> <p>(11) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.</p>  | <p>paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang menjadi wilayah zonasinya.</p> <p>(11) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.</p>  |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 3<br/>Jalur Afirmasi</p>   |   |
|  | <p>3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5a) dan (5b), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6a) dan (6b) dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :</p>  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Jalur PPDB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki risiko serta rentan tertular Covid-19.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Jalur PPDB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan/atau piatu, anak panti, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>(3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Program Indonesia Pintar (PIP) dan/atau tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(5) Ketentuan calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wilayah tugas diluar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan masih terdaftar sebagai warga Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat bertugas orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.</p> <p>(6) Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.</p> <p>(7) Apabila jumlah calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi 5% (lima persen)</p> | <p>kasus Covid-19 yang memiliki risiko serta rentan tertular Covid-19.</p> <p>(3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Indonesia Pintar (PIP) dan/atau tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3a) Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3b) Calon peserta didik anak panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(4) Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(5) Ketentuan calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wilayah tugas di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan masih terdaftar sebagai warga Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Surat Keterangan dari</p> |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan</p> <p>b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(9) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(10) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon peserta didik penyandang disabilitas, dan calon peserta didik dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 kurang dari 15% dari daya tampung sekolah.</p> | <p>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat bertugas orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.</p> <p>(5a) Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.</p> <p>(5b) Calon peserta didik anak panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.</p> <p>(6) Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi</p> <p>(6a) Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5.a) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan</p> <p>b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</p> <p>(6b) Apabila jumlah calon peserta anak panti sebagaimana dimaksud pada ayat (5.b) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan</li><li>b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</li></ul> <p>(7) Apabila jumlah calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afiriasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan</li><li>b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.</li></ul> <p>(8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(9) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p> <p>(10) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik kurang dari 20% dari daya tampung sekolah.</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | (11) Dalam hal jumlah calon peserta didik jalur afirmasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sisanya dipenuhi dari jalur zonasi.   |
| Paragraf 4<br>Jalur perpindahan tugas orang tua/wali   |  |
|  | 4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :  |
| Pasal 13<br>(1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.<br>(2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan .<br>(3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dari luar wilayah zonasi Sekolah yang dituju.<br>(4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota. | Pasal 13<br>(1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.<br>(2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.<br>(2a) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpindahan tugas paling sedikit antar kabupaten/kota.<br>(3) Dihapus.<br>(4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota. |
| Paragraf 5<br>Jalur Prestasi   |  |
| Pasal 14<br>(1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen) atau dalam kondisi terdapat sisa   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>daya tampung pada jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c;</p> <p>(2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot prestasi hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/ kota;</p> <p>(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.</p> <p>(4) Terhadap peserta didik dari satuan pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, atau Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.</p> <p>(5) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi calon peserta didik SMP/ sederajat dari luar Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian.</p> <p>(6) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kelima<br/>Seleksi</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>(1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.</p> <p>(3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga dalam zona sekolah peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik; dan</p> <p>b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</p> <p>(2) Seleksi jalur afirmasi diprioritaskan :</p> <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius domisili alamat peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;</p> <p>b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</p> <p>(3) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :</p> |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah yang ditetapkan berdasarkan jarak/radius domisili alamat peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan RT/RW mengetahui Kelurahan;</p> <p>b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.</p> <p>(4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :</p> <p>a. Nilai akhir tertinggi yang dihasilkan penjumlahan nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi; dan</p> <p>b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik.</p> |   |
|   | <p>5. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf a diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (4a) dan ayat (4b), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) satu ayat baru yaitu ayat (6a), diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7a), sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :</p>   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik.</p> <p>(3) Terhadap peserta didik dari satuan pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p> <p>(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik.</p> <p>(3) Terhadap peserta didik dari satuan pendidikan SMP/ sederajat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, atau Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.</p> <p>(4) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan :</p> <p>a. calon peserta didik dari keluarga miskin, dan calon peserta didik dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki risiko tertular Covid-19 paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah,dan</p> <p>b. calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(5) Ketentuan calon peserta didik dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(6) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan wilayah tugas diluar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan masih terdaftar sebagai warga Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat bertugas orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.</p> <p>(7) Calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19</p> | <p>Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, atau Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.</p> <p>(4) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan :</p> <p>a. calon peserta didik yatim dan/atau piatu, calon peserta didik anak panti, calon peserta didik dari keluarga miskin, dan calon peserta didik dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid-19 yang memiliki risiko tertular Covid-19 paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan</p> <p>b. b. calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.</p> <p>(4a) Ketentuan calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(4b) Ketentuan calon peserta didik anak panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(5) Ketentuan calon peserta didik dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(8) Apabila jumlah calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan</li> <li>b. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(9) Domisili terdekat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik;</p> <p>(10) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.</p> <p>(11) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas pilihan;</li> <li>b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan</li> <li>c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.</li> </ol> | <p>(6) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan wilayah tugas diluar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan masih terdaftar sebagai warga Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat bertugas orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.</p> <p>(6a) Calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(6b) Calon peserta didik anak panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(7) Calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah.</p> <p>(7a) Apabila jumlah calon peserta didik yatim dan/atau piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan</li> <li>b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(8) Apabila jumlah calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>(12) Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari seleksi prestasi.</p> | <p>pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan</li> <li>b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(9) Domisili terdekat calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik.</p> <p>(10) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(11) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas pilihan;</li> <li>b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan</li> <li>c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.</li> </ol> <p>(12) Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari seleksi prestasi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kelima<br/>Penetapan Hasil Seleksi dan Daftar Ulang</p>                       |   |

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung, akan dilakukan tahap penyaluran.</p> <p>(2) Peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri akan disalurkan pada satuan pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya di dalam zona wilayah, di luar zona wilayah atau Pemerintah Daerah lain terdekat.</p> <p>(3) Calon peserta didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, maka tidak perlu melakukan daftar ulang.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:</p> <p>a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; dan</p> <p>b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh<br/>Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah</p>   |   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :</p> <p>a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.</p> <p>b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.</p> |   |
|   | <p>6. BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Bagian Kedelapan dan Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut :</p>  |
|   | <p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan<br/>Pemenuhan Daya Tampung</p>  |
|   | <p style="text-align: center;">Pasal 22 A</p> <p>(1) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan belum terpenuhi setelah diumumkannya seleksi PPDB, maka satuan pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pemenuhan daya tampung.</p> <p>(2) Pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB IV<br/>PENGECUALIAN</p>  |   |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan untuk :</p> <p>a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat kecuali yang menyatakan bersedia bergabung dalam sistem PPDB yang disediakan Daerah;</p> <p>b. SMK Negeri Jawa Tengah;</p>   |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>c. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan</p> <p>d. Kelas Khusus seperti Kelas Khusus Olah Raga dan Kelas Inklusi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">BAB V<br/>PELAPORAN</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;">BAB VI<br/>PENGENDALIAN</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.</p> <p>(3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">BAB VII<br/>PENGADUAN</p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Cabang dan Provinsi.</p> <p>(2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan</p>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas untuk tingkat Cabang Dinas serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Provinsi.</p> <p>(4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.</p> <p>(5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b><br/><b>INFORMASI</b></p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, laman resmi <a href="http://ppdb.jatengprov.go.id">http://ppdb.jatengprov.go.id</a>, pemberitaan media masa dan/atau sarana lainnya.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b><br/><b>LARANGAN</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>BAB X</b><br/><b>SANKSI</b></p>  |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran tertulis;</li> <li>2. penundaan atau pengurangan hak;</li> <li>3. pembebasan tugas; dan/atau</li> <li>4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.</li> </ol> |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>b. b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran tertulis;</li> <li>2. penundaan atau pengurangan hak;</li> <li>3. pembebasan tugas; dan/atau</li> <li>4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.</li> </ol> <p>(2) Pejabat dinas yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi; dan</li> <li>b. Dinas lain dalam lingkup Pemerintah Daerah yang secara fungsional memiliki kebijakan strategis dalam penyelenggaraan PPDB.</li> </ol> <p>(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>   |  |
| <p><b>BAB XI</b><br/><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan</p>  |  |

|  |   |
|--|---|
| Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |   |
| Pasal 32<br>Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur oleh Kepala Dinas  |   |
| Pasal 33<br>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   | Pasal II<br>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah   | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| Ditetapkan di Semarang<br>pada tanggal 10 Mei 2021<br>GUBERNUR JAWA TENGAH,<br>ttd<br>GANJAR PRANOWO   | Ditetapkan di Semarang<br>pada tanggal 31 Mei 2022<br>GUBERNUR JAWA TENGAH,<br>ttd.<br>GANJAR PRANOWO   |
| Diundangkan di Semarang<br>pada tanggal 10 Mei 2021  | Diundangkan di Semarang<br>pada tanggal 31 Mei 2022   |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI<br>JAWA TENGAH,<br>ttd<br>PRASETYO ARIBOWO  | SEKRETARIS DAERAH PROVINSI<br>JAWA TENGAH,<br>ttd.<br>SUMARNO   |
| BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021<br>NOMOR 7   | BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022<br>NOMOR 12   |

